

PEDAGANG KAKILIMA (PKL) DI KOTA SURAKARTA: Persepsi Masyarakat dan Alternatif Penanganannya

Joko Suwandi

Program Studi Akuntansi FKIP

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Jl. A. Yani Pabelan Tromol Pos 1 Kartasura Surakarta 57102

Telp. 0271-717417 psw 130

ABSTRAK

7ujuan penelitian untuk mengetahui persepsi masyarakat kota Surakarta tentang ke-beradaan PKL sebagai sektor usaha informal ditinjau dari aspek ekonomis, sosial dan hukum, serta mengumpulkan alternatif saran/pendapat penanganan PKL agar keberadaannya bernilai positif bagi pembangunan kota.

Variabel penelitian adalah persepsi, Dasar persepsi ; pendidikan, sosial, dan motivasi sebagai variabel bebas (X) dan aspek tinjauan; ekonomi, sosial dan hukum sebagai variabel tergantung (Y). Pengumpulan data menggunakan daftar angket berstruktur

Populasi meliputi; seluruh warga kota yang berumur 15 tahun keatas (357.522 jiwa). Sampel acak menggunakan kombinasi purposive-stratified-quota sampling. Tempat komunitas sampel meliputi; kantor, jalan, pasar/pusat pertokoan, sekolah, dan tempat lainnya sebanyak 200 responden.

Analisa data menggunakan statistik deskriptif. Analisis korelasi dan regresi partial variabel X dan Y menghasilkan kesimpulan; semakin tinggi tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, jumlah pendapatan, jabatan sosial/ketokohan dan motivasi warga, mereka akan mempersepsi lebih positif keberadaan PKL, baik dari tinjauan aspek ekonomi, sosial dan hukum, walaupun tidak dominan. Analisis deskripsi menyimpulkan; menurut tinjauan aspek ekonomi, PKL sebaiknya di pertahankan dan diberdayakan karena berdampak positif pada perekonomian kota. Menurut tinjauan dari aspek sosial, keberadaan PKL berdampak negatif terhadap keindahan kota dan memicu peningkatan arus urbanisasi, tetapi berdampak positif terhadap penurunan angka pengangguran. Dari tinjauan aspek hukum, PKL dinilai sebagai usaha yang 'liar', tidak berijin usaha dan menempati lahan bukan peruntukan.

Alternatif penanganan; Pemkot cq. Dinas Pengelola PKL harus secara konsisten melakukan penataan, pembinaan, penyuluhan dan pemberdayaan terprogram agar keberadaan PKL mampu mendukung program pembangunan kota.

Kata kunci : Pedagang Kaki Lima, Persepsi Masyarakat, Alternatif penanganan.

PENDAHULUAN

Fenomena Pedagang Kaki Lima (PKL) mencuat menjadi isu terbaru kota Surakarta setelah perkembangannya menimbulkan banyak permasalahan. Disatu sisi pemerintah kota (pemkot) wajib mengembangkan dan

memberdayakan ekonomi kerakyatan sebagai salah satu sumber penghidupan masyarakat kota, tetapi disisi lain menimbulkan dampak buruk bagi kebersihan, keamanan, keindahan, dan pelanggaran pendirian tempat usaha tidak pada tempat peruntukan.

Pemkot dalam hal ini Walikota Surakarta, Wakil Walikota (Wawali), dan Dinas Pengelola PKL merasa perlu mengatur PKL di kota Surakarta. Pemkot pada dasarnya mengakui keberadaan PKL di kota Surakarta sebagai salah satu sektor usaha ekonomi yang juga berfungsi sebagai katup pengaman ketenagakerjaan. Pemkot merasa perlu menata dan menertibkan agar keberadaannya tetap menjamin kenyamanan, keamanan dan ketertiban bagi masyarakat dan para pengunjung di kota Surakarta (Solo Pos, 30 Mei 2002). Salah satu program penertiban PKL adalah melakukan penataan dan rencana relokasi (Solo Pos, 23 Mei 2002). Rencana ini mendapat reaksi keras dari kalangan Paguyuban Pedagang Kaki Lima dan Asongan (GUDANG KALIMAS) dan Solidaritas Masyarakat Pinggiran Solo (SOMPIS). Mereka tidak bersedia pindah atau di tertibkan begitu saja. Sebagai realisasi perlawanan, paguyuban menyusun rencana perda baru sebagai revisi Perda No. 8 tahun 1995 tentang PKL yang diserahkan kepada pihak legislatif. Raperda ini memuat peraturan versi PKL yang tentu saja sangat berpihak kepadanya.

Pesatnya pertumbuhan PKL di Kota Surakarta lebih dipicu oleh situasi krisis perekonomian nasional yang tak kunjung selesai. Situasi lebih diperparah dengan terjadinya kerusuhan dan amuk massa tanggal 14 dan 15 Mei 1998 yang menghancurkan sebagian infrastruktur perekonomian kota. Pabrik, *Supermarket*, *Show room*, Toko, rumah banyak dibakar dan dijarah. Dunia usaha Kota Surakarta depresi, banyak perusahaan yang untuk sementara atau selamanya berhenti beroperasi, pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran terjadi. Angka pengangguran meningkat tajam, pendapatan masyarakat berkurang, kesempatan usaha menyempit dan tingkat kesejahteraan masyarakat turun.

Angka pengangguran di kota Surakarta tahun 1999, menurut data dari BPS. Kota Surakarta (2000) tercatat 45.180 orang,

meningkat tajam dibanding tahun sebelum krisis (1997) yang hanya 28.354 orang. Jumlah penduduk pra KS dan KS1 mencapai 41.181 KK naik menjadi 42.229 KK untuk tahun 2000. Keadaan ini diperberat dengan belum pulihnya kondisi perekonomian kota Surakarta maupun nasional yang belum mampu membuka kesempatan kerja dan kesempatan berusaha yang lebih luas. Sektor formal (baca: Pegawai Negeri Sipil) menerapkan konsep *Zerro Growth* yang tidak lagi membuka peluang masuk pegawai baru.

Sektor PKL, sebagai salah satu usaha sektor informal telah menjadi alternatif pilihan usaha sebagian anggota masyarakat mengais rejeki. Menurut data dari Dinas Pasar kota Surakarta, pada tahun 2001 jumlahnya baru mencapai kurang lebih 3.000, sekarang diperkirakan telah naik dua kali lipat (6.000-an). Hampir di seluruh ruang kota yang memiliki potensi ekonomis berkembang menjadi kawasan PKL. Mereka menempati lokasi-lokasi strategis kota dan tidak memperdulikan keindahan, konsep peruntukan lahan dan daerah larangan (alun-alun dan lapangan) seperti di atur dalam Perda No.8/95. Kawasan monumen '45 Banjarsari yang peruntukkannya sebagai situs perjuangan dan taman kota telah berkembang menjadi pusat klitikan untuk aneka jenis barang baru maupun bekas, Alun-alun Utara di gunakan sebagai tempat mangkal beberapa PKL pakaian, sekitar Stadion Manahan di jadikan arena berbagai jenis PKL, sekitar Pasar Klewer menjadi kawasan perdagangan makanan/buah dan pakaian, sepanjang jalan Veteran banyak digelar aneka barang klitikan, jalan Dr. Radjiman banyak penjual pakaian bekas, buah-buahan dan banyak lokasi lain didirikan bangunan warung makan semi permanen.

Keberadaan PKL sebenarnya memiliki beberapa keunggulan. Salah satunya mampu berperan sebagai katup pengaman bagi ketenagakerjaan di kota Surakarta saat terjadi krisis ekonomi. Menurut catatan Dinas Tenaga Kerja kota Surakarta selama kurun

waktu hampir dua tahun, sektor PKL mampu menurunkan angka pengangguran sebesar 30%, yaitu 45.180 orang tahun 1999 turun menjadi 31.561 orang untuk sampai bulan September 2001 (Solo Pos, 6 Oktober 2001). Apabila di kelola secara benar, sektor PKL diyakini memiliki potensi menjadi sumber penghidupan sebagian masyarakat kota, sebagai aset ekonomi yang dapat dijadikan sumber pendapatan asli daerah (PAD) dan dapat meramaikan kehidupan kota yang akan menarik kunjungan wisatawan (Manning dan Efendi, 1996:67).

Dari fenomena sektor informal ekonomi kemasyarakatan, sangat menarik untuk di pahami lebih lanjut tentang keberadaan PKL di kota Surakarta ini. Sebagai langkah awal akan diungkap tentang bagaimana persepsi masyarakat kota Surakarta terhadap keberadaan PKL di tinjau dari aspek ekonomi, sosial dan hukum serta apa alternatif penanganannya?

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat kota Surakarta tentang keberadaan PKL sebagai sektor usaha informal? bagaimana alternatif penanganan PKL di kota Surakarta?

Persepsi adalah suatu keadaan jiwa (mental) dan keadaan pikir yang dipersiapkan untuk memberi tanggapan terhadap suatu obyek yang diorganisir pengalaman serta mempengaruhi secara langsung dan dinamis pada perilaku (James F. Enjel, et.al, 1992:336). Diyakini kualitas persepsi tergantung pada tingkat pendidikan, kualitas komunikasi sosial dan motivasi (Mursito, 1994:62).

PKL merupakan penyebutan usaha ekonomi sektor informal yang melakukan aktivitas di trotoar atau kaki lima (Chamid Abdullah, 1989:3). Usaha yang dilakukan berupa penjualan jasa dan produk yang digelar pada suatu tempat yang tidak permanen. PKL di pandang sebagai sektor kelompok marjinal di masyarakat yang memiliki keterbatasan, baik keterbatasan administrasi maupun finansial, sehingga tidak memungkinkan untuk

terjun di sektor formal. Sebagai kelompok marjinal mereka tidak memiliki kekuatan modal untuk berusaha lebih besar (Arundhati, K. 2000).

Berkait dengan masalah administrasi, sebagian PKL tidak memiliki kepastian hukum dalam hal yang berkaitan dengan tempat mangkalnya, sehingga sering menimbulkan berbagai masalah. Walaupun usaha ini memiliki beberapa keburukan dalam segi ketertiban tetapi dari segi fungsi ada beberapa kemanfaatan yang dapat disumbangkan kepada masyarakat dan pemerintah daerah (Kartono. K, 1980).

Nilai manfaat keberadaan PKL menurut hasil penelitian Ma'arif Jamuin (2000) dengan judul Perilaku Ekonomi Pedagang Warung Tenda Dalam Krisis Moneter: Studi Kasus di Wilayah Kota Barat Surakarta menunjukkan bahwa sebagai sub-sektor usaha kelompok marjinal kota, PKL memiliki peran sebagai: wahana perluasan pasar bagi produk-produk industri dan pertanian, sebagai katup pengaman penyerapan surplus tenaga kerja, tempat pemberdayaan ekonomi masyarakat lapisan bawah, media penyedia konsumsi *subsisten* dengan harga yang relatif dan terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat, wahana rekreasi dan berkreasikan masyarakat.

Yetty Sarjono (2000) meninjau usaha PKL dari sisi struktur, fungsi dan ekonomi. Menurutnya secara struktural PKL berada pada aras ekonomi bawah yang menjadi tumpuan masyarakat menengah kebawah. Secara fungsional keberadaannya sangat dibutuhkan masyarakat sekitar, sebagai sektor yang mampu menyediakan sarana pemenuhan kebutuhan yang bervariasi dengan harga yang terjangkau. Sedang dari tinjauan sisi ekonomi, usaha PKL berfungsi sebagai sumber penghasilan keluarga dan restribusi yang dipungut pemerintah dapat meningkatkan PAD. Hal senada di kemukakan oleh Suyatmini (2000) yang mempertegas bahwa sumbangan PKL terhadap sektor ekonomi cukup besar, bukan saja keberadaannya di perlukan oleh masya-

rakat sekitar tetapi sumbangan redistribusi yang di berikan kepada pemerintah daerah cukup dapat menambah PAD.

Dari segi keindahan dan kesehatan lingkungan sering menimbulkan konflik, seperti dalam penelitian Ma'arif Jamuin (2000) di tunjukkan bahwa secara umum lokasi sekitar mangkal PKL menjadi tampak kumuh dan berbau tidak sedap. Mereka umumnya tidak peduli terhadap kebersihan lingkungan sekitar. Cara meletakkan peralatan usaha di dekat lokasi mangkal secara sembarangan mengurangi nilai keindahan lingkungan. Menurut peneliti, ini disebabkan oleh latar belakang budaya dan kebiasaan pedagang di daerah asal, tetapi ada alasan lain yaitu tidak tersedianya fasilitas buangan limbah di lokasi mangkal. Kondisi ini acapkali menimbulkan gesekan psikologis antara warga masyarakat yang peduli dengan kebersihan lingkungan dan aparat kelurahan .

PKL dapat disebut sebagai sektor usaha kecil yang paling kreatif dan paling tahan terhadap gejolak krisis (Ma'arif Jamuin,2000). Hal ini tidak terlepas dari besarnya motivasi dan mobilitas mereka (Joko Suwandi, 1987). Salah satu bentuknya adalah 65% nekat berusaha walaupun hanya dengan modal sedikit uang, mereka berusaha mencari posisi tempat usaha yang strategis yang banyak di lewati orang-orang yang berbelanja atau jalan-jalan. Untuk itu tidak ayal keberadaannya menimbulkan kesemrawutan lalu lintas dan rentan terhadap resiko pengusuran dan pengusiran. Para PKL menyadari tempat usahanya merupakan tempat larangan untuk berjualan, karena menempati sarana peruntukkan bagi para pejalan kaki (di trotoar). Sedangkan dari tinjauan mobilitas tergolong sangat tinggi, dimana 87% telah mencoba usaha-usaha lain, tetapi merasakan bahwa jenis usaha PKL lebih cocok dengan kondisinya, untuk itu hanya 7% yang berkeinginan untuk pindah keusaha lain, alasannya meliputi; ingin mencari pekerjaan yang menjanjikan kepastian pendapatan (sektor formal), dan mendatangkan

rasa tenang, jauh dari kekhawatiran terhadap pengusuran karena keberadaannya riskan dengan penertiban dari pemerintah daerah.

Penelitian mencoba untuk memberi sumbangan informasi kepada pemerintah kota dalam rangka penyusunan pola penanganan PKL di kota Surakarta yang menguntungkan semua pihak. Namun secara khusus tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah; untuk mengetahui persepsi masyarakat kota Surakarta tentang keberadaan PKL sebagai sektor usaha informal dengan dasar aspek tinjauan ekonomis, sosial dan hukum ? Untuk mengumpulkan alternatif saran pendapat tentang penanganan PKL dari warga masyarakat di kota Surakarta.

Hasil penelitian akan lebih berarti apabila ada nilai kemanfaatan yang dapat di sumbangkan. Adapun kemanfaatan yang diharapkan adalah memberi rangsangan awal bagi para peneliti untuk mengungkap lebih lanjut tentang keberadaan, kehidupan dan penanganan PKL. Memberi masukan bagi pemkot dan DPRD kota dalam menyusun Perda yang tepat dan jelas untuk menangani PKL di kota Surakarta, sehingga keberadaannya dapat membawa kemanfaatan yang besar bagi kepentingan PKL, warga kota, pemkot dan sektor ketenagakerjaan secara umum.

METODOLOGI PENELITIAN

Sesuai tujuan penelitian, maka jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif, yaitu berusaha mendeskripsikan suatu pendapat atau tanggapan menjadi suatu informasi yang menggambarkan secara lengkap persepsi subyek terhadap obyek penelitian (Nana Sudjana, 1989, 64-67). Olah datanya menggunakan statistik deskriptif (*Descriptive Statistics*), yaitu proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Tabulasi menyajikan ringkasan,

pengaturan atau penyusunan data dalam bentuk tabel numerik. Dalam tabel juga digunakan frekuensi yang dinyatakan dengan ukuran absolut (f) dan proporsi (%) (Nur Indriantoro, 1999:170). Variabel persepsi yang menyatakan tanggapan positif atau negatif terhadap suatu fenomena diukur menggunakan Skala Likert dengan skor subyek; sangat setuju (2), setuju (1), tidak mempunyai pilihan (0), tidak setuju (-1), dan sangat tidak setuju (-2). Variabel persepsi dengan variasi latar belakangnya berupa; tingkat pendidikan, status sosial (jenis pekerjaan, pendapatan dan jabatan sosial/ketokohan) responden diukur dengan skala ratio dengan rentangan angka (1, 2, 3 dst), dan motivasi diukur menggunakan *Summated Rating Scale*.

Tempat penelitian adalah daerah atau area dimana penelitian dilaksanakan. Dalam penelitian ini daerah penelitian meliputi seluruh wilayah Pemerintahan Kota (Pemkot) Surakarta yang meliputi lima wilayah kecamatan, yaitu; kecamatan Serengan, Pasar Kliwon, Jebres, Banjarsari, dan kecamatan Laweyan.

Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan Juni 2002 s/d Agustus 2002.

Variabel merupakan proksi atau representasi dari *construct* yang dapat diukur dengan berbagai macam nilai. Variabel merupakan mediator antara *construct* yang abstrak dengan fenomena nyata (Nur Indriantoro: 61). Adapun variabel dalam penelitian ini adalah persepsi yang ditinjau dari aspek ekonomi, sosial dan hukum.

Sumber data diartikan sebagai darimana asal informasi atau data-data penelitian yang diperlukan diperlukan diperoleh. Ada dua sumber data yang digunakan untuk mencari data yang dipandang memiliki tingkat validitas dan reliabilitas tinggi, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer meliputi data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama dan yang bersangkutan terlibat dalam aktivitas yang dinilai pada obyek penelitian. Dalam pe-

nelitian ini sumber data primer meliputi individu-individu dari seluruh warga masyarakat kota Surakarta yang berusia 15 tahun keatas. Dipilih usia 15 tahun keatas, karena pada usia setingkat itu tentunya telah memiliki persepsi terhadap sesuatu fenomena sosial yang ada di sekitarnya. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak secara langsung diperoleh dari orang yang terlibat dalam obyek penelitian, tetapi yang bersangkutan memiliki sejumlah data tentang obyek penelitian yang dapat di pertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini sumber data sekunder adalah Pemkot Surakarta cq. Dinas Pengelolaan PKL, BPS Kota Surakarta, dan Paguyuban PKL.

Untuk keperluan pengumpulan data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, dalam penelitian ini digunakan daftar angket berstruktur sebagai alat pengumpul data utama dan wawancara sebagai alat bantu yang dapat digunakan untuk melengkapi data-data yang diperlukan penelitian.

Populasi penelitian ini adalah seluruh warga masyarakat kota Surakarta yang berumur 15 tahun keatas yang berjumlah 357.522 jiwa.

Pengambilan sampel menggunakan *stratified sampling* (sampling berlapis) dan *random sampling* (sampel acak). Langkah pengambilan sampel pertama-tama adalah menetapkan lapisan masyarakat Surakarta sesuai tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapatan dan motivasinya. Selanjutnya dari setiap lapisan diambil 40 subyek menggunakan tehnik *random sampling* untuk lima tempat komunitas sampel ditemui, yaitu; kantor, jalan, pasar/pusat pertokoan, sekolah, dan tempat lainnya.

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif (Nur Indriantoro, 1999:170), yaitu proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Tabulasi menyajikan ringkasan, pengaturan atau penyusunan data dalam bentuk tabel numerik. Dalam tabel juga digunakan

frekuensi yang dinyatakan dengan ukuran absolut (f) dan proporsi (%). Pembahasan dan telaah dalam penelitian ini diarahkan untuk mengungkap persepsi/tanggapan dari masyarakat kota Surakarta terhadap keberadaan PKL di kota Surakarta berdasar tinjauan aspek ekonomi, sosial dan hukum. Disamping itu bertujuan menampung atau mengumpulkan berbagai alternatif saran dari masyarakat untuk menangani dan menata PKL agar keberadaannya dapat memberi nilai positif terhadap kehidupan perkotaan Surakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN.

Dari olah data diperoleh hasil yang ditabelkan sebagai berikut :

Melalui olah data statistik menggunakan analisa korelasi dan regresi partial dengan alat bantu program Microstat untuk mengetahui hubungan dasar persepsi (tingkat pendidikan, tingkat sosial dan motivasi) dengan aspek tinjauannya diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 2
Hubungan Dasar Persepsi (X) dengan Aspek Tinjauan Keberadaan PKL (Y)

No	Variabel X (Dasar Persepsi)	Variabel Y (Aspek Tinjauan)	Koefisien. Korelasi (r)	Koefisien Regresi (Y _{xy})	F Rasio (F _{tab} 6,334)
1	Pendidikan PT (18%), AMD (11%), SMLA (30,5%), SLTP (21,5%), SD (13%), Tdk Lls SD (6%)	A. Ekonomi	0,7742 (kuat)	Y = -2.8013 + 1,8298X	26,251
		B. Sosial	0,7602 (kuat)	Y = -1,9930 + 1,4417X	21,029
		C. Hukum	0,7518 (kuat)	Y = -1,9969 + 1,4861X	27,360
2	Pekerjaan Prof (12%), PNS/TNI/Polri (25%), Kary swasta (15,5%), Swasta (11,5%), Pedg (16,5%), Pel-Mhs (13%), Tdk Bekerja (4,5%), lain-lain (2%).	1. Ekonomi	0,1926 (diabaikan)	Y = 3,8142 + 0,0769X	7,628
		2. Sosial	0,0905 (diabaikan)	Y = 2,6496 + 0,0551X	6,633
		3. Hukum	0,1915 (diabaikan)	Y = 1,9296 + 0,0876X	7,536
3	Pendapatan (Rp) < 2Jt (8,5%), 1,5-2Jt (10,5%), 1- < 1,5Jt (16%), 0,5- < 1 Jt (35,5%), > 5Jt (22,5%), 0 (7%)	4. Ekonomi	0,3296 (rendah)	Y = 3,2647 + 0,5200X	7,080
		5. Sosial	0,3056 (rendah)	Y = 1,5041 + 0,3932X	6,516
		6. Hukum	0,2476 (rendah)	Y = 0,2476 + 0,4564X	28,419

4	Jabatan Sosial (Ketokohan) Memiliki (37%) dan Tidak Memiliki (63%)	7. Ekonomi	0,3978 (rendah)	$Y=1,2121+1,8196X$	37,215
		8. Sosial	0,3536 (rendah)	$Y=0,0534+1,3990X$	28,290
		9. Hukum	0,4541 (sedang)	$Y=-0,8672+1,8593X$	51,439
5	Motivasi Tinggi (15,83%), Sedang (17,83%), dan Rendah (66,34%)	10. Ekonomi	0,5574 (sedang)	$Y=1,5687+1,0516X$	9,447
		11. Sosial	0,4547 (sedang)	$Y=-0,1595+0,7936X$	51,610
		12. Hukum	0,3207 (rendah)	$Y=-0,2237+0,4849X$	22,692

Sumber : *Printout* olah data menggunakan Program Microstat.

Uji statistik menyimpulkan bahwa :

Semakin tinggi tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, jumlah pendapatan, jabatan sosial/ketokohan dan motivasi warga masyarakat akan mempersepsi lebih positif atas keberadaan PKL ditinjau dari aspek ekonomi, sosial dan hukum walaupun tidak dominan. Dikatakan demikian karena sebagian besar derajat hubungan variabel dasar persepsi dengan nilai persepsinya tergolong rendah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil tabulasi frekuensi, selanjutnya akan ditarik kesimpulan penelitian berupa persepsi masyarakat Kota Surakarta terhadap keberadaan PKL yang ditinjau dari aspek ekonomi, sosial dan hukum serta alternatif penanganan.

Tinjauan dari aspek Ekonomi :

1. Warga masyarakat tidak yakin bahwa usaha PKL saat ini dapat diandalkan sebagai pekerjaan pokok dan sekaligus sumber penghasilan yang layak para PKL. Tetapi bagaimanapun usaha PKL dianggap sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan kreatifitas masyarakat miskin dalam menyikapi krisis yang berkepanjangan.

2. Usaha PKL dianggap tidak dapat memberi sumbangan keuntungan finansial yang berarti bagi warga sekitar lokasi PKL, tetapi untuk lingkup kota di percaya dapat menunjang program kepariwisataan, yaitu mampu menarik kunjungan wisata ke kota yang selanjutnya meningkatkan perekonomian kota.
3. Hasil pungutan retribusi PKL dinilai tidak cukup berarti (kecil) bagi sumber PAD kota Surakarta. Namun diakui dapat meningkatkan percepatan perputaran uang (*velocity of money*) dan peningkatan percepatan roda perekonomian kota. Selain itu efek multiplier dari investasi sektor PKL dapat meningkatkan pendapatan masyarakat kota Surakarta.

Tinjauan Dari Aspek Sosial :

1. Warga masyarakat Kota Surakarta menganggap bahwa keberadaan PKL di wilayah kota Surakarta sangat merusak keindahan kota, menimbulkan kekumuhan dan memicu kesemrawutan lalu lintas kota. Walaupun demikian warga tidak menuding keberadaan PKL memicu kerawanan keamanan lingkungan, peningkatan angka kriminalitas kota atau memicu kegiatan prostitusi.

2. Keberadaan PKL berdampak pada masalah demografi, dimana di satu sisi keberadaannya dapat mengurangi angka pengangguran perkotaan, tetapi di sisi lain dapat meningkatkan angka urbanisasi.

Tinjauan Dari Aspek Hukum :

1. Secara hukum, usaha PKL dinilai tidak memiliki kepastian hukum, karena tidak berijin, baik ijin usaha maupun ijin pemakaian lokasi.
2. Tempat usaha PKL dinilai masyarakat 'liar', karena menempati lokasi bukan peruntukan, seperti; taman kota, trotoar, emper toko, lapangan, alun-alun dsb.
3. Barang yang diperdagangkan PKL secara umum dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, hanya untuk PKL makanan higienitasnya diragukan.
4. Peran Pemkot Surakarta dalam pemberdayaan PKL dinilai sangat kecil.

Alternatif penanganan dari masyarakat adalah :

1. Pemkot cq. Dinas Pengelola PKL harus melakukan pembinaan, penataan, dan penyuluhan secara rutin dan berkesinambungan untuk memberdayakan PKL agar keberadaannya mampu mendukung program pembangunan kota.
2. PKL sebaiknya diberi pelatihan/kursus ketrampilan yang berkaitan dengan usahanya, sehingga dapat meningkatkan kualitas manajemen dan pelayanannya.
3. PKL tidak perlu dialih profesi kepekerjaan lain, tetapi hanya perlu diberdayakan termasuk mengupayakan penambahan modal usaha dengan pinjaman.
4. Dilakukan penataan terhadap PKL untuk meminimisir eksese negatif, seperti; merusak keindahan dan keasrian, kekumuhan dan kesemrawutan, agar dapat menjadi daya tarik wisatawan.
5. Perlu dilakukan relokasi ke dalam suatu kawasan tertentu yang representatif bagi kelompok usaha PKL yang memiliki

pembeli bersifat '*planned buyer*', atau pembelinya telah merencanakan dahulu apa yang akan dibeli dan dimana membelinya. Atau kalau perlu dijadikan pasar seperti pasar Triwindu.

6. Perlu segera dilakukan revisi Perda No. 8 tahun 1995 tentang PKL dan hasil revisi harus disosialisasikan secara luas kepada masyarakat, khususnya masyarakat PKL. Disamping itu dalam merevisi perda harus melibatkan PKL dan *stakeholder* yang memiliki kepentingan terhadap keberadaan PKL.

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, maka peneliti menyarankan kepada Pemkot Surakarta, cq. Dinas Pengelola PKL, dan para PKL.

1. Melihat adanya perubahan motivasi para PKL yang di sebabkan adanya perubahan kondisi ekonomi, sosial, politik dan keamanan, maka seyogyanya segera di susun definisi yang jelas tentang PKL dan diterbitkan Peraturan Daerah (Perda) PKL yang baru yang lebih aspiratif terhadap keberadaan PKL saat ini dan mensosialisasikannya secara luas kepada masyarakat PKL (khususnya).
2. Menata dan merelokasi PKL dengan mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Kota (RTRK) atau Rencana Induk Kota (RIK), keberadaan situs sejarah, program BERSERI, tuntutan PKL dan warga masyarakat secara keseluruhan.
3. Melakukan tindakan tegas terhadap pelanggar aturan yang ada dengan di dahului tindakan persuasif.
4. PKL harus menyadari dan memperhatikan kepentingan umum yang lebih tinggi diatas kepentingan pribadi masing-masing dan selalu mengedepankan pertimbangan rasional.
5. Meningkatkan pelayanan jasa dengan mempertimbangkan aspek hukum dan aspek kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA.

- Arundhati, K. (2000), *Pemberdayaan PKL melalui kebijaksanaan Pembinaan, Dukungan, Kemitraan, serta peningkatan Ketrampilan*, Jakarta, NEED Lingkungan Manajemen Ilmiah 2 (10), Oktober 2000.
- Budi Prayitno, 2001, *Kasualitas Pertumbuhan Tenaga Kerja dan Tingkat Penyerapan di Kota Surakarta (Penel)*, Surakarta, Lemlit-Unisri.
- Chamid Abdullah, 1989, *Peran Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Ekonomi di Jawa Timur*, Surabaya, Lemlit Untag.
- Irwan Abdullah, 1997, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta, Dirjen Pendidikan Tinggi Depdikbud.
- Harold Koontz, (1996), *Manajemen*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- James F. Enjel, (1992), *Psikologi Sosial*, Bandung, Alfabeta.
- Joko Suwandi, 1987, *Motivasi dan Mobilitas Pedagang Kakilima Sepanjang Jalan Gatot Subroto Solo*, Surakarta, LPPM-Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Kartono, K. 1990. *Menggali Potensi PKL sebagai unsur pembangunan Dalam Pembangunan Bandung Kota Indah*, Bandung, Fak, sospol, Unpad.
- Kuntjorojakti, 1994, *Kemiskinan di Indonesia*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Ma'arif Jamuin, 2002, *Perilaku Ekonomi Pedagang Warung Tenda Dalam Krisis Moneter: Studi Kasus di Wilayah Kota Barat Surakarta*, Surakarta, Lemlit UMS.
- Manning, dan Effendi, 1996, *Urbainsasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Mohammad As'at, (1998), *Psikologi Industri*, Yogyakarta:Liberty-Press.
- Nana Sudjana dan Ibrahim, (1989), *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, Bandung, Penerbit Sinar Baru.
- Solo Pos, 6 Oktober 2001, 23, Mei 2002, 24 Mei 2002 dan 30 Mei 2002.
- Suyatmini, 2000, *Profil Pedagang Kaki Lima di Kartasura Kabupaten Sukoharjo*, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial-IPS-FKIP-UMS, Vol. 10 No. 2 Desember 2000.
- Yetty Sarjono, 2000, *Analisis Perubahan Sosial Pedagang Sektor Informal di Kartasura Jawa Tengah*, Surakarta, Lemlit UMS.
- Vembriarto, (1990), *Patologi Sosial*, Yogyakarta: IKIP Yogyakarta Press.